

BAB II

BEBERAPA TEORI TENTANG JARINGAN

Jaringan sebagai Modal Sosial

Pada umumnya konsep jaringan sosial dalam studi sosiologi dan antropologi termasuk dalam pembahasan terkait dengan modal sosial (*social capital*). Modal sosial oleh banyak pakar sosiologi, paling tidak seperti Bourdieu (1986), Putnam (1993), Coleman (1988), dan Lawang (2004), dilihat sebagai modal yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat, yang muncul dari interaksi individu dalam upaya bermasyarakat, untuk berkomitmen satu sama lain dan menciptakan tatanan sosial untuk mencapai sebuah tujuan bersama.

Sehingga modal sosial akan menjadi kekuatan sosial jika ada konstruksi sosial yang terbentuk dari interaksi sosial antar individu-individu, baik terbatas pada komunitas itu saja (*bonding social capital*) maupun dengan komunitas di aras yang lebih luas dari kelompok terbatas (*bridging social capital*). Modal sosial dalam pengertian ini merupakan alat yang dikonstruksikan oleh individu-individu dalam sebuah kelembagaan jaringan untuk mencapai tujuan bersama.

Modal sosial oleh Bourdieu didefinisikan sebagai sumber daya aktual yang potensial dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik (keanggotaan dalam kelompok sosial). Modal sosial memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif, termasuk didalamnya pelebagaan jaringan sosial juga menjadi penentu tindakan sosial dari aktor.

Sedangkan Coleman, mendefinisikan modal sosial lebih pada gambaran sebuah institusi formal yang memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan

individu dalam struktur sosial tersebut. Dalam pengertian ini, ada bentuk-bentuk modal sosial berupa kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat melahirkan kontrak sosial.

Putnam, mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai mutual *trust* (kepercayaan) antar anggota masyarakat maupun masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu *social networks (networks of civic engagement)* atau ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas komunitas. Putnam juga berpendapat bahwa tidak hanya yang memberi *desireable outcome* (hasil pendapatan) yang diharapkan melainkan juga *undesirable outcome* (hasil yang tidak terduga).

Lawang, menegaskan bahwa kekuatan sosial menunjuk pada semua mekanisme yang sudah dan dikembangkan oleh komunitas dalam mempertahankan hidupnya. Pengertian komunitas dapat mengacu pada komunitas mikro, mezo dan makro. Kekuatan-kekuatan sosial sebagai modal sosial dapat terbatas pada komunitas itu saja yang dilihat sebagai *bounded social capital* atau jika sudah dikaitkan dalam bentuk jaringan dengan modal sosial meso dan makro dapat disebut sebagai *bridging social capital*. Kalau satuan pengamatan dan analisisnya adalah meso sebagai *bounded* maka yang makro adalah *bridging*.

Dalam pemikiran Lawang, modal sosial pada dasarnya merupakan konstruksi sosial untuk mengatasi masalah sosial yang dibangun melalui interaksi sosial antar individu-individu sehingga terbentuklah kekuatan sosial kolektif. Sehingga modal sosial dalam pengertian ini merupakan alat yang dikonstruksi oleh aktor-aktor

untuk mencapai tujuan bersama. Kemungkinan modal sosial bisa menjadi dominan dalam mengatasi suatu masalah sosial bisa saja menjadi penting tetapi mungkin juga tidak seberapa penting. Namun prinsip sinergi diantara berbagai kepentingan aktor menurut Lawang tetap berlaku, agar modal sosial dapat digunakan sebagai kekuatan sosial untuk mencapai tujuan bersama.

Kekuatan sosial yang didapat dari kelembagaan jaringan bisa menjadi kekuatan yang sangat besar karena dalam berbagai kasus jaringan ini tidak akan terbatas pada jaringan bounding tetapi juga akan meluas dan bahkan bisa menjadi sebuah gerakan social society. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Diani dan McAdam (2003). Mereka mengemukakan bahwa jaringan memudahkan untuk memperluas jaringan tersebut dalam rangka membangun gerakan sosial yang pada akhirnya dapat mendorong aksi kolektif. Bahkan meskipun individu yang terlibat dalam aksi kolektif tersebut tidak mempunyai hubungan dengan para aktor maupun jaringan sosial yang memiliki peran kuat, namun melalui penyebaran isu oleh anggota jaringan dapat mempermudah perluasan aksi kolektif.

Dalam kehidupan masyarakat, jejaring sosial tidak hanya terdiri dari civil society organizations, namun melibatkan partai politik, lembaga-lembaga agama dan sosial, pranata adat, dan aktor-aktor individu seperti para informal tokoh-tokoh masyarakat, pengusaha, dll. Dengan keterlibatan yang unsur yang bervariasi dari jaringan, aspek politik menjadi menonjol. Artinya ada kepentingan yang melekat dari perakitan jaringan. Kepentingan ini bisa positif atau negatif tergantung dari sudut pandangnya, apakah dari dalam jaringan atau luar jaringan. Dengan demikian peran jaringan bisa terjadi dalam hal negatif (konflik) maupun positif (Rekonsiliasi).

Pemenuhan kepentingan bersama terjadi dalam masyarakat dengan melakukan kerjasama sosial. Modal sosial tersebut memperlambat hubungan antar anggota masyarakat serta menjadikannya hubungan yang harmonis sehingga lebih mudah dalam menangani permasalahan

sosial yang ada. Penanganan permasalahan sosial yang ada ini menjadikan masyarakat mudah dalam mencapai apa yang diinginkan bersama.

Keperangkatan, kepranataan dan nilai-nilai sosial didalam modal sosial merujuk pada bagian organisasi sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan terkoordinasi dalam masyarakat. Modal sosial dapat juga merujuk pada institusi hubungan sikap dan nilai yang membimbing interaksi kontribusi pada perkembangan konflik dan rekonsiliasi.

Upaya rekonsiliasi paska kerusuhan merupakan bagian yang penting agar konflik komunal tidak berlarut-larut. Upaya rekonsiliasi bisa datang dari inisiatif pemerintah maupun masyarakat. Dikalangan studi tentang perdamaian, ada beberapa pendekatan yang biasa dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam upaya rekonsiliasi. Pendekatan yang lasim digunakan adalah dengan membangun pola-pola hubungan atau interaksi antara negara dan masyarakat di daerah-daerah konflik, antar masyarakat yang bertikai, termasuk bagaimana pola hubungan antar keduanya muncul dalam proses kelahiran suatu kebijakan dan atau konsep dalam rangka resolusi konflik. Selain pendekatan militer, mengisolir konflik, memisahkan antara pihak yang bertikai, dan negosiasi atau dialog dengan sifat elitis.

Dalam satu segi, pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah telah menunjukkan kewajiban pemerintah selaku penjaga stabilitas negara, dengan pengakhiran sementara konflik. Akan tetapi apakah bisa benar-benar menyelesaikan akar persoalan konflik dan menjamin tidak akan terulangnya konflik komunal? Sebagian literatur mengatakan pendekatan pemerintah yang demikian tidak bisa menyentuh akar persoalan dan hanya dipermukaan saja karena sifatnya yang elitis dalam melakukan dialog. Kehadiran tokoh dianggap mewakili kelompok yang bertikai, padahal dalam kelompok ada banyak aktor yang memegang peranan dan memiliki kepentingan yang berbeda.

Berkebalikan dengan apa yang dilakukan pemerintah, kalangan masyarakat yang berinisiatif melakukan rekonsiliasi berinisiatif mendorong pendekatan yang berbeda. Sebagian kalangan NGO/Forum warga seperti Madia, Paramadinah, Interfidei, LKIS, Wahid Institute, Forum Gedangan menjalankan program-program dialog antar agama. Pendekatan yang dilakukan adalah mengedepankan adanya partisipasi, kesamaan derajat, pertemuan secara langsung dengan suasana yang lebih cair, pelibatan nilai-nilai lokal dan pelebagaan jaringan lokal.

Dalam studi konflik di Ambon Tony D. Pariela (2008) mengemukakan bahwa peran *agency/mediator/advokator*, menjadi sangat jelas bagaimana mendorong kedua belah pihak yang berkonflik untuk mulai belajar tentang pengetahuan (*knowledge*) terkait dengan realitas obyektif dan subyektif. Transfer *survival strategy* yang ditempuh oleh *agency* tersebut setidaknya telah mendorong terjadinya usaha menjembatani (*bridging the gap*) antar-*bonding*. Beberapa usaha menjembatani yang sudah mereka lakukan dapat disebutkan dengan: [a] membagi informasi (*sharing information*); [b] mengkoordinasikan aktivitas (*coordinating activities*); [c] membuat keputusan bersama (*making collective decisions*); dan [d] membangun jejaring. Apa yang sebenarnya telah ditempuh kelompok ini sebenarnya merupakan pengembangan lebih jauh dari prinsip *social capital* yang menekankan pentingnya mengaktualisasikan tiga elemen: *trust* (kepercayaan), *norms* (norma-norma), dan *bonding* serta berjejaring dalam sebuah proses yang simultan.

Jaringan Aktor

Menurut hemat saya, ketika berbicara tentang peran jaringan, aktor tidak bisa di lepaskan dari pembicaraan. Ada koneksi antar aktor yang terjadi dalam jaringan. Apalagi dalam kaitannya merespon perubahan sosial politik, bukan jaringan yang merespon perubahan tetapi aktor. Aktor yang melakukan respon terhadap perubahan sosial

politik yang lalu mengkonstruksi jaringan sebagai modal sosial untuk merespon perubahan sosial politik tersebut.

Dalam perkembangan jaman, pandangan tentang jaringan sebagai modal sosial telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Perkembangan terbaru pemikiran tentang jaringan dalam ilmu sosial dikenal dengan nama *Actor Network Theory* (ANT). ANT mulai berkembang pada awal tahun 1980 an di Centre de Sociologie de l'Innovation (CSI) Paris. Tokoh-tokoh yang mengembangkan pemikiran tentang ANT antara lain yaitu, Bruno Latour, John Law dan Michael Callon. Beberapa sosiolog tersebut melihat bahwa ruang sosial saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Ruang interaksi sosial yang dulu terbatas oleh ruang geografis, dengan adanya perkembangan teknologi ruang ini meluas dan tidak terbatas. Seperti yang dikemukakan oleh Latour (2005), "*collective as an expansion of natural and sociology of associations as the resumption of sociology of the social*".

Menurut Law (1999) "*ANT examines the interconnections of human and nonhuman entities base upon an anti-foudationalist approach in which nothing exists prior to its performance or enactment*". Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana proses dari unsur-unsur dari jaringan dapat berkumpul/menyatu, menjaga agar tetap menyatu, dan merakit jaringan agar dapat memunculkan kekuatan (seperti: pengetahuan, identitas, perilaku, moral, kebijakan, keyakinan, dll.) bagi tercapainya tujuan bersama. Dengan demikian ANT akan melihat tiap-tiap unsur dari sebuah rakitan secara utuh, utamanya unsur-unsur (aktor) yang menentukan bagi munculnya kekuatan. Apa yang diperhatikan ANT tidak hanya apa yang tampak di permukaan namun lebih dalam, mulai dari sejarah dan latar belakang dibalik terbentuk atau kembali terbentuknya jaringan, serta *trajectory* dari masing-masing aktor yang merakit jaringan kolektif.

Jika dikaitkan istilah *trajejory* yang dikemukakan Latour dan apa yang disebut oleh Bourdieu dengan *habitus*, tampak ada kesamaan atau keterkaitan. *Bourdieu (1977:77) is the locus of the inculcation and*

development of an individual's habitus, it is the educational institution whose task it is to transmit consciously this system of unconscious schemes. The School's express function is 'to transform the collective heritage into an individual and common unconscious' (1969:118). Habitus merupakan internalisasi norma, pemahaman, dan pola tingkahlaku, yang mengakibatkan perbedaan antara kelompok yang satu dengan yang lainnya (Pamerdi, 2009: 18). Habitus juga merupakan penentu tindakan sosial dari aktor. Dengan demikian tiap aktor mendapatkan sejarah pembentuk diri dari jaringan disatu sisi namun bersama itu pula aktor juga menjadi salah satu bagian yang berperan dalam proses pembentukan kelembagaan jaringan. Aktor menurut Bourdieu, juga dalam keterlibatannya baik dalam jaringan sosial maupun dalam ruang “wilayahnya” akan berjuang dan berstrategi untuk mencapai posisi yang tertinggi dengan segala cara.

Self Creation dan Jaringan

Habitus menurut Bourdieu merupakan penentu tindakan sosial dari aktor. Dengan artian bahwa habitus dipandang sebagai sesuatu yang statis. Akan tetapi muncul sebuah pertanyaan terkait dengan aktor yang selalu diperhadapkan dengan perubahan sosial politik yang bergerak secara dinamis dalam masyarakat, akankah aktor hanya bertindak sesuai dengan habitusnya? Aktor memiliki kemampuan untuk melakukan respon terhadap perubahannya, dan yang diperlukan aktor adalah adanya self creation dalam menyikapi perubahan ini.

Dalam kamus bahasa Inggris istilah self creation memiliki arti: *“a person's essential being that distinguishes them from others, especially considered as the object of introspection or reflexive action”*. *Self creation* bisa berarti seseorang (aktor) secara sadar membuat dirinya berbeda dengan orang lain atas intropeksi dan refleksi terhadap apa yang sedang di hadapinya. Dengan demikian aktor merupakan individu yang bebas dan kreatif yang memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan termasuk strateginya, bahkan didalam jaringan

yang berbasiskan ikatan parokhial (keagamaan, kekerabatan, kesukuan, dan lain-lain) sekalipun.

Bila konsep *self creation* ini ditarik pada pembentukan jaringan, maka bisa dimengerti bahwa aktor memiliki kehendak bebas untuk menjadi bagian dari sebuah jaringan. Dimana jaringan juga menyediakan sarana untuk menjadi diri yang kreatif. Ini berarti menjadi bagian dari jaringan tidak harus tunduk atau mengikuti saja nilai, norma, tradisi, dan pola pikir dalam jaringan tersebut, tetapi aktor dapat menciptakan sendiri dalam bentuk/cara baru, dan bahkan tujuannya pribadi yang kemudian memberi pengaruh pada tujuan kolektif.

Dalam studi jaringan, konsep *self creation* juga bisa dinaikkan levelnya menjadi *social creation*. Beberapa sosiolog berpendapat bahwa *social becoming* (terjadinya kelompok sosial) sangat terkait erat dengan *social creation*. Seperti halnya *self creation*, *social creation* merupakan upaya dari kelompok sosial untuk bersikap kreatif dan memberi pembedaan dengan jaringan yang lebih luas darinya. Hal ini bisa muncul terutama ketika masyarakat menghadapi tantangan pembangunan.

Akan tetapi menurut Valérie Nicole (2012), *self creation* aktor dalam jaringan merupakan “*negotiating complex and multiple relationships of power, for the person herself, and for the community. Just because one works on personhood and on the self does not mean that power and power relationships are absent or do not play a role in the way one understands oneself*”. Ini berarti bahwa individu walaupun kreatif dan memiliki kebebasan tetapi tetap ada upaya memahami kepentingan bersama yang harus dilakukan dengan cara negosiasi kepentingan.

Jaringan dalam Ruang lingkup Studi Pembangunan

Dalam ruang lingkup studi pembangunan, pembangunan diarahkan pada perkembangan dan perhatiannya kepada pembangunan

berkelanjutan. Secara sederhana pembangunan berkelanjutan dapat dikatakan bahwa pembangunan perlu mempertimbangkan pada sisi pemenuhan kebutuhan manusia sekarang/saat ini, tetapi juga pemenuhan kebutuhan generasi dimasa yang akan datang. Seperti yang juga tertuang dalam dokumen PBB “Our Common Future”, Bab II, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai berikut, *"Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains within it two key concepts:*

- *the concept of needs, in particular the essential needs of the world's poor, to which overriding priority should be given; and*
- *the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the environment's ability to meet present and future needs."*

Lalu pertanyaannya pembangunan merupakan kewajiban siapa? Apakah hanya pemerintah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan melalui kebijakan-kebijakannya? Benar bahwa kewajiban utama pembangunan ada di tangan pemerintah (Sutoro, 2015). Tetapi pembangunan perlu dilakukan bersama dengan masyarakat. Pembangunan hanya dapat dilakukan dan terjaga keberlanjutannya jika ada peran dari berbagai pihak termasuk masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat dalam bentuk jaringan untuk mengupayakan pembangunan. Sutoro, meyakini bahwa modal sosial yang hidup di desa-desa, baik dalam bentuk tradisional maupun modern, merupakan sarana bagi memunculkan solidaritas sosial yang berguna bagi pembangunan. Modal sosial dapat membuat relasi-relasi baik vertikal maupun horisontal dapat terjadi untuk kepentingan bersama. Hubungan antar pelaku usaha, hubungan antara masyarakat dengan pemangku kebijakan, dan bentuk hubungan lainnya, sebagai contoh.

Kelompok-kelompok masyarakat melalui jaringannya memiliki multi fungsi yang dapat digunakan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi, sosial dan bahkan ekologi. Misalnya, gerakan sosial untuk

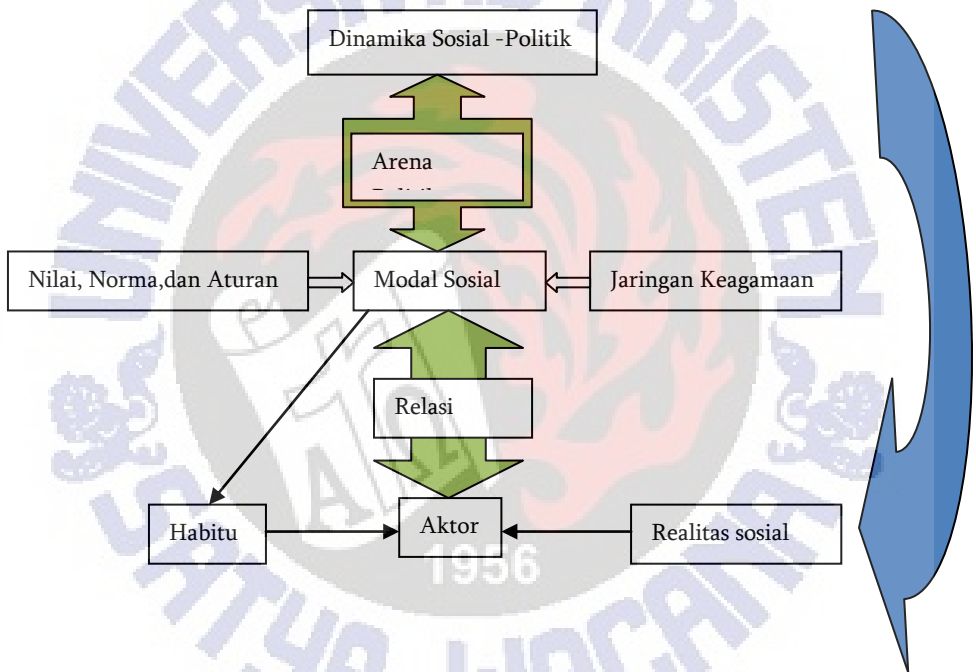
penanggulangan sampah yang dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pihak. Tanpa adanya relasi yang terbuka dari semua pemangku kepentingan termasuk didalamnya masyarakat, gerakan untuk penanggulangan sampah sangat sulit untuk dilakukan. Pemerintah memiliki inisiatif misalnya untuk mengelola sampah, tetapi tanpa ada dukungan dari masyarakat tentu akan sulit untuk mengimplementasikan programnya.

Dengan demikian menumbuhkan kesadaran akan pentingnya dimensi kultural dan pendayagunaan peran lembaga-lembaga yang tumbuh dalam masyarakat untuk mempercepat dan mengoptimalkan proses-proses pembangunan menjadi penting. Fukuyama (2002) menyebutkan bahwa kultural, khususnya modal sosial menempati posisi yang sangat penting sebagai faktor yang menentukan kualitas masyarakat. Kualitas masyarakat yang baik juga akan menentukan kemampuan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pembangunan terutama dalam penciptaan situasi sosial yang kondusif, jauh dari konflik-konflik yang dapat menghambat pembangunan. Hal ini juga di perkuat dari studi tentang rekonsiliasi, Kriesberg berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat interaksi dan saling ketergantungan antar pihak-pihak yang tadinya berkonflik, akan semakin membatasi munculnya konflik-konflik baru (Krisberg, 2003:384). Hal ini karena interaksi antar aktor dapat menimbulkan saling pengertian dan berkembangnya norma-norma bersama juga akan dapat mencegah pengulangan konflik.

Kerangka Pikir

Jaringan keagamaan terdiri dari aktor-aktor yang memiliki berbagai modal (capital) termasuk juga social capital berbentuk jaringan diluar keagamaan. Dalam diri aktor, capital-capital ini dapat ditransformasikan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Aktor dengan capitalnya memberi pengaruh pada bentuk jaringan, tetapi juga sebaliknya jaringan mempengaruhi nilai, norma, pola pikir dan perilaku aktor. Dengan adanya pembentukan pola pikir dan perilaku

aktor, jaringan dapat membangun gerakan sosial keagamaan untuk pencapaian tujuan bersama yang kemudian jika terus dikembangkan dapat melakukan collective action. Collective action ini dapat menghasilkan hal yang positif maupun yang negatif, yang kemudian memberi pengaruh kembali kepada aktor-aktor untuk melakukan refleksi diri sebagai bagian dari pengambilan keputusan dan penyusunan strategi aktor dalam keterlibatannya di jaringan keagamaan.



Dari diagram diatas tampak bahwa dinamika sosial-politik merupakan realitas sosial yang dihadapi oleh aktor dalam kehidupan sehari-hari. Untuk merespon realitas sosial, aktor menggunakan modal sosial dalam betuk jaringan. Modal sosial ini diperoleh aktor melalui relasi sosial.

Untuk merespon realitas sosial, jaringan sosial dengan kepentingan serta tujuan bersama-sama masuk dalam arena politik. Akibat perebutan kepentingan dari berbagai jaringan sosial yang sama-sama masuk dalam arena politik, maka terjadilah dinamika sosial politik. Proses ini terjadi berulang-ulang sebagai bagian dari kehidupan aktor dan jaringannya.

Dalam modal sosial, jaringan berkelindan dengan nilai, norma, dan aturan, yang membentuk habitus bagi aktor. Dengan demikian aktor selain mempergunakan jaringan untuk tujuan dan kepentingannya, aktor terikat dengan nilai, norma dan aturan yang hidup dalam jaringan.